BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perumusan strategi pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, dan penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah juga memanfaatkan data sosial ekonomi dan melakukan verifikasi kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Strategi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pendampingan melalui P2K2, serta pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Implementasi strategi PKH telah dilaksanakan melalui penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendampingan, pelaksanaan P2K2, pemenuhan komitmen pendidikan dan kesehatan, serta monitoring terhadap kondisi penerima. Pelaksanaan melibatkan Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga program dapat berjalan secara terkoordinasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian data, perubahan domisili

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kendala teknis dalam penyaluran bantuan.

3. Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring dan pelaporan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pelaksanaan program. Pelaporan dilakukan dengan memanfaatkan SIKS-NG yang mencakup perkembangan penyaluran bantuan, kehadiran P2K2, pemenuhan komitmen pendidikan dan kesehatan, serta perubahan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan pemutakhiran data dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah berjalan cukup baik dan terkoordinasi, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pemutakhiran dan ketepatan data penerima, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan monitoring dan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi strategi tersebut. Hambatan utama berkaitan dengan dinamika data penerima PKH yang mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, ketidaksesuaian NIK, perpindahan domisili tanpa pelaporan, keterlambatan pembaruan kondisi ekonomi, serta kendala teknis penyaluran bantuan turut

memengaruhi ketepatan sasaran dan kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keterbaruan data penerima.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara terstruktur dan adaptif dengan Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam pendataan, verifikasi, pemutakhiran data, pendampingan, dan monitoring Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kelurahan berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pelaporan perubahan data serta mendukung penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan lebih tepat sasaran dan optimal.

5.2 Rekomendasi

Untuk memperkaya penelitian ini dan melengkapi hasil yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas Strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Bekasi, disarankan untuk terus memperkuat pemutakhiran dan validasi data KPM secara berkala agar perubahan kondisi sosial ekonomi dapat segera tercatat dalam sistem. Selain itu, peningkatan

koordinasi dengan Disdukcapil, kecamatan, kelurahan, dan pendamping PKH perlu dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian NIK, perubahan domisili, serta permasalahan data lainnya sehingga penyaluran PKH dapat lebih tepat sasaran.

2. Bagi Kecamatan Bekasi Timur dan Kelurahan Margahayu, disarankan untuk meningkatkan peran aktif dalam pemantauan perubahan kondisi KPM, terutama bagi penerima yang berpindah tempat tinggal atau mengalami perubahan kondisi ekonomi. Koordinasi dan pelaporan secara berkala dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial juga perlu diperkuat agar setiap perubahan data dapat segera ditindaklanjuti.
3. Bagi pendamping PKH, disarankan untuk meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring melalui P2K2 serta memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing KPM. Pendampingan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban penerima bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan keterampilan, pemanfaatan bantuan secara produktif, dan kemandirian ekonomi KPM agar dapat mencapai graduasi dari PKH.
4. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, disarankan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan P2K2, menyampaikan setiap perubahan data dan kondisi keluarga kepada pendamping, serta memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program. KPM juga diharapkan dapat memanfaatkan pelatihan dan pendampingan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan atau indikator lain yang belum dikaji dalam penelitian ini, seperti efektivitas PKH terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi KPM, keberhasilan graduasi, serta peran koordinasi antarinstansi. Penelitian dengan wilayah dan periode yang lebih luas juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengentasan kemiskinan melalui PKH.